

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

No	Komoditas	Januari		Februari		Maret		Perubahan
		M2	M4	M2	M4	M2	M4	
1	Beras Medium*	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 13.300	0,06
2	Beras Premium*	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 14.500	0,00
3	Cabe Merah*	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 55.000	0,22
4	Bawang Merah*	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	0,00
5	Daging Ayam Broiler*	Rp 30.000	Rp 33.000	Rp 40.000	Rp 37.000	Rp 40.000	Rp 42.000	0,40
6	Telur Ayam Ras*	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 30.000	Rp 30.000	0,07
7	Daging Sapi*	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 135.000	0,08
8	Gula Pasir Lokal*	Rp 17.000	Rp 18.000	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 18.000	Rp 18.500	0,09
9	Bawang Putih*	Rp 40.000	Rp 42.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	-0,13
10	Cabe Rawit Merah*	Rp 40.000	Rp 70.000	Rp 95.000	Rp 75.000	Rp 95.000	Rp 60.000	0,50
11	Minyak Goreng (Kemasan)	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 22.000	0,29
12	Minyak Goreng (Curah)	Rp 19.500	Rp 19.500	Rp 21.000	Rp 21.000	Rp 24.000	Rp 24.000	0,23
13	Mie Instan*	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00
14	Susu Bubuk*	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	0,00
15	Ikan Kembung*	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 60.000	Rp 60.000	0,25
16	Tempe 1 Kg*	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00
17	Tepung Terigu Segitiga Biru*	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00
18	Udang*	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 120.000	Rp 120.000	0,09
19	Tahu Mentah 1 Kg*	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00
20	Pisang 1 Kg*	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	0,00
21	Susu Balita (SGM) 400Gr*	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 44.500	0,00
22	Jeruk 1 Kg*	Rp 18.000	Rp 19.000	Rp 20.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 32.000	0,78

Berdasarkan dari data survey harga kebutuhan pokok pada Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar) di Pasar Banjar, pada Bulan Januari – Maret 2026 secara umum perkembangan harga di Kota Banjar menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan pada beberapa komoditas strategis, meskipun sebagian komoditas lainnya relatif stabil.

Periode Januari ke Februari, mulai terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, terutama daging ayam broiler, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng curah, dan ikan kembung. Sementara itu, terdapat penurunan pada bawang putih dan cabe merah, yang mengindikasikan adanya perbaikan pasokan pada periode tersebut. Memasuki bulan Maret, tekanan harga kembali meningkat pada sejumlah komoditas, antara lain beras medium, daging sapi, minyak goreng (kemasan dan curah), ikan kembung, udang, serta jeruk. Kenaikan signifikan juga terjadi pada cabe merah, setelah sebelumnya mengalami penurunan. Di sisi lain, beberapa komoditas tetap stabil sepanjang triwulan, seperti beras premium, bawang merah, mie instan, susu, tempe, tepung terigu, tahu, pisang, dan susu balita.

Secara kumulatif Triwulan I, komoditas dengan kenaikan tertinggi secara persentase adalah:

- Jeruk sebesar 78%
- Cabe rawit merah sebesar 50%
- Daging ayam broiler sebesar 40%
- Diikuti minyak goreng, ikan kembung dan cabe merah dengan kenaikan yang cukup signifikan.

Kenaikan harga pada komoditas tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi, seperti ;

- Meningkatnya permintaan (khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri)
- Gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik
- Serta dinamika harga di tingkat pemasok
- Selain itu, kelompok komoditas protein hewani dan hortikultura menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, sehingga menjadi penyumbang utama tekanan inflasi pada periode ini.

Di sisi lain, stabilitas harga pada beberapa komoditas menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi relatif terjaga. Penurunan harga bawang putih juga menjadi indikasi adanya perbaikan pasokan di pasar. Secara keseluruhan, perkembangan harga pada Triwulan I Tahun 2026 masih dalam kondisi relatif terkendali, namun tetap perlu diwaspadai adanya potensi tekanan inflasi dari kelompok volatile food.

IPH Kota Banjar Triwulan I 2026

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Banjar selama Triwulan I Tahun 2026, terlihat adanya dinamika pergerakan harga yang cukup fluktuatif, mencerminkan kondisi pasokan dan distribusi bahan pangan di daerah.

1) Januari 2026

Pada bulan Januari, IPH berada pada zona deflasi, dengan tren penurunan dari -3,81 pada minggu ke-1 menjadi -4,58 pada minggu ke-4. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum harga bahan pangan pada periode tersebut mengalami penurunan, yang mengindikasikan pasokan relatif melimpah dan daya beli masyarakat cenderung stabil.

2) Februari 2026

Memasuki bulan Februari, terjadi perubahan signifikan dari kondisi deflasi ke inflasi. IPH melonjak menjadi 2,57 pada minggu pertama dan terus meningkat hingga mencapai 4,31 pada minggu ke-4. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan harga yang cukup kuat, yang dipengaruhi oleh mulai meningkatnya harga pada beberapa komoditas strategis, khususnya kelompok pangan bergejolak seperti hortikultura dan daging.

3) Maret 2026

Pada bulan Maret, IPH mengalami penurunan kembali ke level yang lebih terkendali, yaitu dari 0,70 pada minggu pertama menjadi 0,85 pada minggu kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi mulai mereda, meskipun masih berada pada zona inflasi ringan. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dari sisi pasokan maupun distribusi, sehingga laju kenaikan harga dapat dikendalikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Permasalahan utama terlihat pada tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura,

khususnya cabe rawit merah, cabe merah, dan jeruk, yang mengalami kenaikan cukup signifikan dengan fluktuasi yang tajam antar waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pasokan komoditas hortikultura belum terjaga secara optimal, yang dipengaruhi oleh faktor musiman, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta sensitivitas terhadap gangguan distribusi.

- Selain itu, kenaikan harga pada komoditas daging ayam broiler, ikan kembung dan udang juga menjadi sumber tekanan inflasi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya produksi dan distribusi, serta keterbatasan pasokan yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi dampak penyerapan dari SPPG di Kota Banjar.
- Tekanan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng, baik kemasan maupun curah, yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya pengaruh faktor eksternal yang disebabkan oleh kenaikan harga ditingkat distributor.
- Lebih lanjut, struktur pasokan pangan di Kota Banjar yang sebagian masih bergantung pada daerah lain menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan terhadap gejolak harga. Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam mengendalikan harga ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di daerah pemasok.
- Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa komoditas yang relatif stabil, kondisi ini belum cukup untuk menahan tekanan inflasi secara keseluruhan, karena dominasi pengaruh komoditas bergejolak masih cukup besar dalam pembentukan harga.
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjar pada Triwulan I Tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh ketidakstabilan pasokan, tingginya ketergantungan antar daerah, fluktuasi harga komoditas *volatile food*, serta belum optimalnya intervensi stabilisasi harga. Kondisi ini memerlukan penguatan koordinasi dan langkah pengendalian yang lebih responsif dan terintegrasi ke depan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Keterjangkauan Harga

- Selasa Pasar Hasil Tani (Sapa Hati) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada triwulan I dilaksanakan sebanyak 2 kali (3 dan 13 Maret 2026), konsep membuka pasar bagi para petani yaitu dalam rangka mempertemukan petani dengan konsumen. Komoditas yang tersedia dalam kegiatan ini dari petani antara lain: cabe, bawang, beras dan aneka macam komoditas penyumbang inflasi *leading sector*nya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
- Operasi Pasar Murah (OPM) pada triwulan I dilaksanakan sebanyak 5 kali pada tanggal 24 dan 26 Februari, 3, 5, 13 Maret 2026 dengan tujuan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, mengendalikan inflasi *volatile food*, serta membantu meringankan beban masyarakat dengan memastikan bahan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau *leading sector*nya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar (DISKUKMP).
- Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) berupa 20 Kg beras dan 4 liter minyak kepada 11.214 penerima Banpang di Kecamatan Langensari dan Purwaharja.

b. Ketersediaan Pasokan

- Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian sektor pertanian, Pemerintah Kota Banjar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan **Penanaman Jagung** serentak pada hari Jum'at,

07 Maret 2026.

- Kegiatan Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L) yang menjadi program unggulan dari Kota Banjar Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui **penanaman cabai rawit, cabai merah** dan komoditas pangan penyumbang inflasi di lahan pekarangan KWT maupun masyarakat umum.
- Kegiatan Serap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani tanggal 26 dan 29 Januari, 18 Februari 2026 untuk memastikan ketersediaan pasokan akan gabah daerah tersedia.
- Dalam rangka memperkuat ketersediaan pasokan dan ketahanan Pangan Kota Banjar memberikan bantuan Alsintan berupa Traktor Roda 4 kepada KWT Tani Sekar Mukti tanggal 14 Januari 2026

c. Kelancaran Distribusi

- Pada Triwulan I 2026 baru dilaksanakan inventarisasi untuk perbaikan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung kelancaran pengiriman dari sentra produksi ke pasar, menekan biaya logistik, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat, sehingga pelaksanaan perbaikan infrastruktur dilaksanakan mulai triwulan II 2026.
- Pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor yang dilaksanakan secara rutin

d. Komunikasi Efektif

- **High Level Meeting** Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pada triwulan I 2026 (20 Januari 2026, 10 Februari dan 18 Maret 2026).
- **Pelaksanaan Sidak Pasar** di Kota Banjar selama triwulan I dilaksanakan sebanyak 6 kali (06 & 24 Januari, 03 & 24 Februari, 07 & 27 Maret 2026) dengan tujuan untuk memantau ketersediaan stok komoditas pangan pokok.
- Pemantauan harga di pasar tradisional dilaksanakan setiap hari senin s.d jum'at dengan pasar pantauan, yaitu Pasar Banjar.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- Pelaporan harga pangan secara harian melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jabar, Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi) dan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
- Publikasi data harga bahan kebutuhan pokok di media sosial dan Papan *running text* yang ada di depan alun-alun Kota Banjar.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. **Keterjangkauan Harga (K1)** à Pelaksanaan kegiatan Selasa Pasar Hasil Tani (Sapa Hati) dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Operasi Pasar Murah (OPM), terbukti mampu menahan potensi lonjakan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti cabai, beras dan minyak goreng. Penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari

sebelas ribu penerima juga memberikan dampak langsung dalam menjaga daya beli masyarakat rentan. Namun demikian, frekuensi pelaksanaan GPM yang masih terbatas dan kecenderungan intervensi yang bersifat reaktif menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang lebih bersifat preventif dan berbasis data.

- b. **Ketersediaan Pasokan (K2)** à Berbagai program seperti penanaman jagung serentak, penguatan program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L), serta kegiatan serap gabah kering panen (GKP), telah mendukung upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah. Dukungan alat dan mesin pertanian juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas petani. Meskipun demikian, dampak dari program tersebut masih bersifat jangka menengah hingga panjang, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih terintegrasi antara proyeksi kebutuhan dan kapasitas produksi daerah.
- c. **Kelancaran Distribusi (K3)** à Pelaksanaan perbaikan infrastruktur masih berada pada tahap inventarisasi sehingga belum memberikan dampak langsung terhadap distribusi, biaya logistik, maupun stabilitas harga. Sementara itu, pemantauan ketersediaan pangan di tingkat distributor telah berjalan rutin sebagai langkah deteksi dini, namun masih perlu dioptimalkan dengan tindak lanjut yang lebih responsif. Secara keseluruhan, kebijakan belum berdampak signifikan sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan fisik pada Triwulan II 2026.
- d. **Komunikasi Efektif (K4)**
 - Koordinasi lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM), sidak pasar, serta partisipasi aktif dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat provinsi telah berjalan secara konsisten dan menunjukkan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan.
 - Sistem pelaporan harga berbasis digital yang terintegrasi telah mampu menyediakan data perkembangan harga secara rutin, akurat, dan relatif memadai sebagai bahan pemantauan kondisi inflasi daerah.
 - Publikasi harga bahan pokok melalui media sosial dan sarana informasi publik, seperti papan running text, berkontribusi dalam meningkatkan transparansi informasi serta memberikan referensi harga bagi masyarakat.
 - Pemanfaatan data yang tersedia belum sepenuhnya optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif, cepat, dan tepat sasaran.
 - Diperlukan penguatan implementasi kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) melalui optimalisasi dashboard dan sistem peringatan dini (*early warning system*) inflasi daerah.
 - Upaya komunikasi publik perlu ditingkatkan tidak hanya dalam penyampaian informasi, tetapi juga dalam bentuk edukasi yang mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih bijak, adaptif, dan berorientasi pada diversifikasi pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Meningkatkan frekuensi dan pemerataan pelaksanaan GPM/Sapa Hati di seluruh wilayah berbasis peta sebaran inflasi dan kantong kerentanan.
- Menggeser pola intervensi dari reaktif menjadi preventif melalui pemanfaatan data harga harian sebagai dasar penentuan waktu operasi pasar.
- Mengembangkan pasar tani berkelanjutan (periodik) untuk memperpendek rantai distribusi dari petani ke konsumen.
- Memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan distributor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis.
- Menjaga keberlanjutan program bantuan pangan dengan penajaman sasaran penerima

berbasis data terpadu.

- Memperluas dan memperkuat program PAKAYA-P2L melalui peningkatan skala, pendampingan dan dukungan sarana produksi.
- Meningkatkan peran cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) untuk stabilisasi pasokan saat terjadi gejolak harga.
- Mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
- Mengoptimalkan serap gabah dan dukungan alsintan untuk menjaga stabilitas produksi dan kesejahteraan petani.
- Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
- Melakukan pemetaan rantai pasok komoditas strategis guna mengidentifikasi titik hambatan distribusi.
- Mendorong efisiensi biaya logistik dan distribusi, termasuk kerja sama dengan pelaku transportasi dan distributor.
- Mengembangkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan.
- Memperkuat sistem monitoring distribusi untuk mencegah penimbunan dan gangguan pasokan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dari Silinda, Simawas Pagi, dan SP2KP sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
- Mengembangkan dashboard pengendalian inflasi yang terintegrasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini (*early warning system*).
- Memperkuat kualitas dan konsistensi pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) sebagai forum pengambilan keputusan strategis.
- Meningkatkan edukasi publik terkait pola konsumsi bijak, substitusi pangan, dan diversifikasi konsumsi.
- Memperluas kanal komunikasi publik agar informasi harga lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat.